

## BAB II

### ADOPSI ATSP PADA PROGRAM NASIONAL

#### 2.1 Pariwisata Kalimantan Timur

Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi pariwisata yang sangat baik untuk dapat dikembangkan lebih optimal. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya pembangunan ibu kota pemerintahan Indonesia atau dikenal sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tepatnya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini kemudian membuka peluang yang luas bagi kota dan kabupaten di Kalimantan Timur untuk mengembangkan daerahnya terlebih dalam sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata di Kalimantan Timur sendiri diharapkan agar sektor pariwisata juga dapat turut memiliki peran dominan dalam penyumbang pendapatan daerah, dimana Kalimantan Timur sendiri pada Triwulan III tahun 2023 pendapatan daerahnya masih didominasi oleh pertambangan sebesar 37,20%.<sup>29</sup> Selain itu bagi sisi lingkungan hidup sektor pertambangan merupakan sektor yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan karena aktivitas pertambangannya yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan sedangkan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dalam pembangunannya cenderung memiliki sedikit dampak negatif bagi lingkungan oleh karena itu

---

<sup>29</sup> BPS Kalimantan Timur, "Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III-2023 Terhadap Triwulan Yang Sama Tahun Sebelumnya (y-on-y) Mengalami Pertumbuhan Sebesar 5,29 Persen," Kaltim BPS, 2023, <https://kaltim.bps.go.id/pressrelease/2023/11/06/1004/ekonomi-provinsi-kalimantan-timur-triwulan-iii-2023-terhadap-triwulan-yang-sama-tahun-sebelumnya--y-on-y--mengalami-pertumbuhan-sebesar-5-29-persen.html>.

dikembangkannya sektor pariwisata di Kalimantan Timur diharapkan tidak hanya sebagai pendorong perekonomian namun juga sebagai salah satu cara untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Hingga tahun 2023, berbagai indikator dalam pariwisata Kalimantan Timur telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini dilihat pada jumlah objek wisata, jumlah akomodasi, dan jumlah kunjungan wisatawan. Di Kalimantan Timur sendiri terdapat 10 jenis obyek wisata seperti objek wisata alam, wisata buatan, wisata budaya, taman wisata laut, dan wisata lainnya. Hingga tahun 2023 objek wisata alam merupakan objek wisata yang paling diminati jika dibandingkan dengan objek wisata lainnya di Kalimantan Timur yaitu mencapai 393 objek wisata. Setiap tahunnya sejak 2021 hingga 2023 objek wisata di Kalimantan timur terus mengalami peningkatan jumlah unit yang kemudian meningkatkan jumlah total dari seluruh objek wisata Kalimantan Timur dari 809 unit objek wisata pada 2023 kemudian meningkat hingga 1.238 unit objek wisata di Kalimantan Timur dengan beberapa destinasi wisata unggulan seperti Kepulauan Derawan, Pantai Manggar, Museum Mulawarman, dan lain lain.

*Tabel 2.1 Objek Wisata Kalimantan Timur*

<b>Objek Wisata Kalimantan Timur</b>				
<b>No.</b>	<b>Jenis Objek Wisata</b>	<b>Tahun</b>		
		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
1	Objek Wisata Alam	260	260	393

2	Objek Wisata Sejarah dan Budaya	177	177	244
3	Objek Wisata Buatan	150	150	244
4	Objek Wisata Kehidupan Masyarakat	54	54	59
5	Objek Wisata Bahari	48	48	120
6	Objek Wisata Taman Hutan Raya	7	7	12
7	Objek Wisata Nasional	4	4	7
8	Objek Wisata Taman Wisata Laut	64	64	66
9	Objek Wisata Hutan Mangrove	19	19	39
10	Objek Wisata Religi	26	26	54
Total Objek Wisata		809	809	1238

Sumber: Kaltimprov.go.id

Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalimantan Timur mencapai 26.031 wisatawan angka ini melampaui angka yang ditargetkan oleh dinas pariwisata yaitu 10.000 pengunjung,<sup>30</sup> dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 jumlah

<sup>30</sup> Satu Data Kalimantan Timur, "DATA PERGERAKAN KUNJUNGAN WISMAN PER 31 SEPTEMBER 2023 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR," Satu Data Kalimantan Timur, 2023, [https://data.kaltimprov.go.id/zh\\_Hans\\_CN/dataset/data-pergerakan-kunjungan-wisman-per-31-september-2023-provinsi-kalimantan-timur/resource/b33de968-7c4f-4f7a-8553-ae254cc962f0](https://data.kaltimprov.go.id/zh_Hans_CN/dataset/data-pergerakan-kunjungan-wisman-per-31-september-2023-provinsi-kalimantan-timur/resource/b33de968-7c4f-4f7a-8553-ae254cc962f0).

wisatawan mancanegara ke Kalimantan timur berkisar 17.798 dan pada tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan berkisar 16.507 wisatawan oleh karena itu pencapaian jumlah wisatawan pada 2023 dinilai cukup signifikan. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan nusantara sepanjang tahun 2023 mencapai 4.399.236 wisatawan, yang dimana angka ini telah jauh melampaui target yang telah ditetapkan oleh dinas pariwisata yaitu sebanyak 2.300.000 kunjungan dan juga angka ini menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelum yaitu pada 2021 dengan total pengunjung 3.055.130.<sup>31</sup>

Peningkatan kunjungan wisatawan ke Kalimantan Timur salah satunya disebabkan oleh berjalannya pembangunan IKN yang kemudian menjadi daya tarik baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu peningkatan ini juga berkaitan dengan meningkatnya keaktifan dinas pariwisata Kalimantan Timur dalam melakukan promosi pariwisata dengan menggunakan sistem MICE (*Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions*) dimana melalui sistem ini Dinas Pariwisata Kalimantan Timur berharap dapat menjadi pendorong bagi pengembangan destinasi wisata di Kalimantan Timur untuk kedepannya dapat memperluas lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal, dan mendorong masuknya investasi untuk memaksimalkan pengembangan destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur. Untuk ketersediaan fasilitas restoran dan hotel di Kalimantan Timur untuk restoran mengalami peningkatan dari 2.177 restoran pada tahun 2022 meningkat menjadi 4.879 restoran di tahun 2023, sedangkan untuk jumlah hotel pada tahun 2022

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

hingga 2023 mengalami penurunan pada jumlah total keseluruhan dari 413 hotel pada 2022 menurun menjadi 333 hotel pada 2023, dimana penurunan ini paling banyak terjadi pada hotel bintang 1, sedangkan untuk hotel dengan bintang 3 dan 4 mengalami peningkatan sebanyak 11 hotel ditahun 2022-2023.

Namun dengan meningkatnya jumlah objek wisata dan kedatangan wisatawan di Kalimantan timur tidak kemudian berbanding lurus dengan peningkatan jumlah tenaga kerja pada sektor pariwisata di Kalimantan Timur hal ini ditunjukkan pada menurunnya jumlah tenaga kerja pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022 jumlah tenaga kerja pada sektor pariwisata di Kalimantan timur mencapai 48.732 orang yang kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2023 hingga mencapai angka 28.193 orang.<sup>32</sup>

## 2.2 Asean Tourism Forum (ATF)

*The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) adalah sebuah organisasi regional yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara yang telah dibentuk sejak 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh 5 negara yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina dan kemudian disahkan melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Sesuai dengan yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok tujuan dari dibentuknya ASEAN ialah mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Asia Tenggara; menjaga

---

<sup>32</sup> Satu Data Kalimantan Timur, "Data Rkpd Pariwisata Prov Kaltim Tahun 2016 2023," Satu Data Kalimantan Timur, 2023, <https://data.kaltimprov.go.id/dataset/data-rkpd-pariwisata-prov-kaltim-tahun-2016-2023/resource/11f0ce78-c49e-4a40-86a8-813a5b0d2802>.

perdamaian dan stabilitas antar negara; meningkatkan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi; saling membantu dalam memfasilitasi penelitian atau pelatihan pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi; bekerja sama untuk memaksimalkan pertanian. Industri, dan perdagangan; meningkatkan studi terkait isu-isu Asia Tenggara; menjaga kerja sama yang terjalin dengan organisasi internasional dan regional lainnya.<sup>33</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut para negara-negara anggota ASEAN kemudian bersepakat melakukan berbagai kerjasama di berbagai sektor salah satunya kerjasama dalam sektor pariwisata.

Pariwisata adalah sektor yang memiliki pengaruh cukup besar dalam perekonomian di suatu negara, tak terkecuali di negara-negara ASEAN. Tiap negara ASEAN memiliki daya tarik dan keunikan pariwisatanya masing-masing yang kemudian meningkatkan potensi pariwisata negara-negara ASEAN untuk dapat bersaing dengan pariwisata negara lainnya serta dapat membuka peluang ekonomi yang berasal dari sektor pariwisata, oleh karena itu sebagai bentuk fokus ASEAN terhadap sektor pariwisata dibentuklah *ASEAN Committee on Trade and Tourism* untuk menjadi salah satu komite yang berada dibawah lingkup kementerian perekonomian ASEAN yang pada saat itu disetujui oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.<sup>34</sup> *ASEAN Committee on Trade and*

---

<sup>33</sup> Sekterariat Nasional Asean Indonesia, "Catat! Ini Tujuan Dan Latar Belakang Dibentuknya ASEAN, Jangan Sampai Salah," Setnasasean, 2020, <https://setnasasean.id/news/read/catat-ini-tujuan-dan-latar-belakang-dibentuknya-asean-jangan-sampai-salah>.

<sup>34</sup> World Trade Organization, "ASEAN PREFERENTIAL TRADING ARRANGEMENTS," 1960, <https://docs.wto.org/gattdocs/q/GG/L6599/6569.PDF>.

*Tourism* bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan pariwisata melalui perjanjian dan promosi antar negara ASEAN.

Pariwisata menjadi salah satu bidang utama kerjasama ASEAN sejak awal organisasi ini didirikan, Kerjasama pariwisata ASEAN dijalankan dengan kesadaran seluruh negara anggota bahwa untuk mewujudkan pariwisata kawasan Asia Tenggara yang bertumbuh dan bebas hambatan, dibutuhkan satu kerangka tersendiri yang dapat menjadi payung bagi kepentingan setiap negara anggota di sektor pariwisata. Oleh karena itu, negara-negara anggota ASEAN kemudian bersepakat untuk membentuk sebuah forum yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah bagi negara-negara untuk saling bertukar informasi dan ide mengenai pariwisata masing-masing negara anggota, yang disebut dengan *ASEAN Tourism Forum (ATF)*.

*Asean Tourism Forum (ATF)* adalah sebuah forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1981 bertempat di Malaysia. Forum ini merupakan sebuah bentuk kerja sama regional dan menjadi wadah bagi negara-negara ASEAN untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan mengundang keterlibatan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk mempromosikan negara-negara ASEAN sebagai pariwisata utama dunia. Melalui ATF juga pemerintah dan sektor swasta yang turut hadir juga dapat melakukan diskusi terkait kondisi pariwisata di setiap negara, kendala apa yang sering kali terjadi, dan peluang apa yang saat ini dilihat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan; setelah itu dapat melakukan peninjauan terkait strategi atau kebijakan yang sebelumnya telah dilakukan, efektifitas, dan implementasinya untuk mengetahui perkembangan dan pengaruh

atas strategi atau kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya; kemudian dapat melakukan penyusunan strategi untuk mengembangkan atau menyempurnakan strategi atau kebijakan yang telah ada sebelumnya agar dapat semakin memaksimalkan pengembangan pariwisata di ASEAN.

Dibentuknya ATF sendiri bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai pariwisata tunggal, menciptakan dan meningkatkan kesadaran untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan tujuan wisatawan asing yang mampu bersaing, meningkatkan kunjungan wisatawan ke pariwisata negara-negara anggota, mempromosikan pariwisata ASEAN, dan memperkuat kerjasama dalam sektor pariwisata antar negara-negara ASEAN.<sup>35</sup> Dalam menjalankan kerjasama ini ATF melibatkan banyak sekali pihak yang berhubungan erat dengan sektor pariwisata baik pemerintah, swasta, hingga masyarakat di tingkat regional dan nasional, dalam hal ini seperti penyedia tempat tinggal, tour guide, penyedia transportasi, biro perjalanan wisata, penerbangan, instansi terkait, pemilik restoran, kelompok sadar wisata, pengelola destinasi wisata, duta wisata, dan lain sebagainya. Dimana keterlibatan seluruh pihak dalam pengembangan pariwisata dalam ATF ini nantinya akan dapat meningkatkan peran aktif setiap pihak, meningkatkan pembangunan wisata kawasan, dan mencapai tujuan yang telah dirancang oleh ATF.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> AKMAL ABDUL ROUF, "UPAYA ASEAN DALAM MENDORONG TERWUJUDNYA ASEAN TOURISM SINGLE DESTINATION TAHUN 2025" (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/16057>.

<sup>36</sup> Ibnu Hilmy Ghalib, "PERAN ASEAN DALAM ATF UNTUK MENINGKATKAN PARIWISATA DI INDONESIA" (Universitas Pasundan, 2016), <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/12073>.

### 2.3 ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015

Sebagai sebuah organisasi regional untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai ATF membentuk sebuah strategi untuk mendorong efektivitas kerjasama pariwisata di negara-negara ASEAN. Salah satu strategi yang dibentuk oleh ATF adalah *Asean Tourism Strategic Plan (ATSP) 2011-2015*, ATSP 2011-2015 dibentuk pada Pertemuan Menteri Pariwisata ASEAN (M-ATM) yang diadakan pada tahun 2011 di Kamboja.<sup>37</sup> Visi dari dibentuknya ATSP 2011-2015, adalah meningkatkan jumlah pengunjung ke wilayah tersebut dengan beragam produk, peningkatan konektivitas, dan lingkungan yang aman, peningkatan kualitas layanan, peningkatan kualitas hidup dan kesempatan bagi masyarakat melalui kerjasama yang efektif antara masyarakat dengan berbagai pemangku kepentingan pada tahun 2015. Melalui strategi ATSP ini kemudian dapat menjadi standarisasi yang diberlakukan bagi seluruh negara-negara anggota ASEAN dalam pembangunan pariwisatanya dengan memperhatikan pembangunan pariwisata yang bertanggung jawab serta berkelanjutan.

Pada ATSP 2011-2015 terdapat 3 arahan strategis yaitu Mengembangkan produk-produk pariwisata di kawasan ASEAN, pemasaran kreatif, dan strategi investasi; Peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia di kawasan; dan Meningkatkan serta mempercepat Aksesibilitas perjalanan dan konektivitas antar negara-negara ASEAN. Melalui 3 arahan tersebut kemudian terdapat 8 aksi strategis yang harus disesuaikan serta diimplementasikan oleh setiap negara

---

<sup>37</sup> RANDY TIRTASANDI, "BAGAIMANA PERAN ASEAN TOURISM FORUM TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA MALAYSIA" (International Relations, 2018), <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/19020>.

ASEAN.<sup>38</sup> Pada arahan strategi pertama untuk mengembangkan produk-produk pariwisata di kawasan ASEAN, pemasaran kreatif, dan strategi investasi dibentuk 3 aksi sebagai upaya untuk mencapai arahan tersebut yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan strategi marketing bagi pariwisata di kawasan ASEAN, mengembangkan paket usaha pariwisata regional atau sub regional dengan menggunakan strategi investasi, meningkatkan konektivitas dan prosedur bagi pariwisata ASEAN. Pada arahan strategis kedua untuk mencapai arahan peningkatan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia pada pariwisata negara anggota ASEAN dibentuk 3 aksi strategis yaitu pengembangan standar pariwisata melalui proses sertifikasi, melaksanakan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk menciptakan sumber daya manusia yang profesional pada bidang pariwisata, serta membuka kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada pengembangan ilmu pariwisata. Pada arahan strategis ketiga arahan difokuskan pada meningkatkan dan mempercepat fasilitas perjalanan dan konektivitas antar negara-negara ASEAN yang dikembangkan melalui 2 aksi strategis yaitu mengajukan visa tunggal bagi kawasan ASEAN serta bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di setiap negara anggota ASEAN untuk memperluas dan mempermudah konektivitas antar negara.

Namun pada implementasi ATSP 2011-2016 di Indonesia sendiri belum dapat berjalan dengan efektif dan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap pariwisata di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena kurangnya kepatuhan Indonesia dalam menerapkan strategi dan aksi yang telah ditetapkan pada ATSP

---

<sup>38</sup> Asean, "ASEAN Tourism Strategic Plan 2011 - 2015," 2015, [https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/documents/ATSP 2011-2015.pdf](https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/archive/documents/ATSP%202011-2015.pdf).

2011-2016. Selain itu faktor lain yang menyebabkan implementasi ATSP 2011-2016 kurang efektif di Indonesia adalah disaat itu belum adanya sinkronisasi antara program yang dibentuk oleh kementerian pariwisata dengan strategi ATSP, hal ini disebabkan karena strategi ATSP 2011-2016 yang kurang relevan dengan permasalahan pariwisata yang ada di Indonesia yang kemudian menyebabkan kurangnya kepatuhan Indonesia dalam menerapkan strategi tersebut.

#### **2.4 ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP) 2016-2025**

Setelah berjalannya strategi pariwisata ATSP 2011-2016 untuk semakin meningkatkan kontribusi ASEAN pada pariwisata regional, ASEAN membentuk ATSP 2016-2025 yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang lebih spesifik dibandingkan dengan strategi di periode sebelumnya. ATSP 2016-2025 telah direncanakan pembentukannya sejak ATF meeting 2015 dan disahkan pada ATF meeting tahun 2016, dimana pada proses pembentukan ATSP tersebut melalui ATF meeting negara-negara ASEAN tidak kemudian menjadi satu-satunya aktor yang berperan pada pembentukan ATSP karena dalam ATF meeting tersebut juga turut melibatkan sektor swasta seperti perusahaan hotel, resort, maskapai penerbangan, hingga media pariwisata dari tiap negara anggota seperti pada tahun 2016 Thailand sebagai salah satu negara yang terlibat dalam ATF Meeting melibatkan Angsana Laguna Phuket Resort, Centara Hotel & Resort, Cliff Spa untuk turut berkontribusi pada proses pembentukan ATSP tersebut melalui pemberian saran serta informasi kondisi dimana hal ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pembentukan ATSP agar strategi yang dibentuk tidak hanya

bermanfaat bagi negara saja namun juga membawa keuntungan bagi sektor pariwisata lainnya.<sup>39</sup>

Setelah itu pada *ATF Meeting* juga turut melibatkan *National Tourism Organization* (NTO), NTO akan menjadi organisasi yang nantinya akan mengawasi implementasi dari ATSP di setiap negara anggota melalui *NTO Meeting*. *NTO meeting* adalah pertemuan yang dihadiri oleh *National Tourism Organization* (NTO) serta petinggi dari lembaga pariwisata di setiap negara anggota sehingga dalam *NTO Meeting* pembahasan difokuskan pada penerapan dan evaluasi pada ATSP dalam meningkatkan pariwisata ASEAN. Hal ini kemudian juga menggambarkan penggunaan model preferensi global dimana dalam sebuah pembentukan kebijakan dalam hal ini adalah ATSP tidak hanya negara yang berperan di dalamnya namun juga terdapat peranan dari stakeholder pariwisata lainnya seperti swasta dan organisasi internasional.

Pada ATSP 2016-2025 strategi dibentuk dengan pendekatan yang lebih strategis untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada pertumbuhan pariwisata di kawasan ASEAN yaitu pemasaran destinasi pariwisata, standar kualitas pariwisata dan SDM, investasi, keterlibatan masyarakat, keselamatan dan keamanan pariwisata, serta konservasi alam dan budaya. Sejalan dengan visi dari ATSP 2016-2025 yaitu pada tahun 2025 pariwisata di kawasan ASEAN akan menjadi destinasi wisata yang berkualitas yang menawarkan keunikan dan pengalaman yang beragam, serta berkomitmen untuk membangun pariwisata yang

---

<sup>39</sup> Kemenparekraf, "ASEAN Tourism Forum 2023 Hadirkan Ministerial Meetings Hingga Travex," Kemenparekraf, 2023, <https://mice.kemenparekraf.go.id/news/b515130a-be33-4894-a67a-6044352adad2>.

bertanggung jawab, berkelanjutan, dan inklusif agar pariwisata dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat ASEAN.

*Tabel 2.2 Strategi Asean Tourism Strategic Plan 2016-2025*

<b>Strategic Directions</b>	<b>Strategic Directions 1</b> Enhance competitiveness of ASEAN as a single tourism destination	<b>Strategic Directions 2</b> Ensure that ASEAN tourism is sustainable and inclusive
<b>Strategic Action Programs</b>	1.1 Intensify Promotion and Marketing	2.1 Upgrade Local Communities and Public-Private Sector Participation in the Tourism Value Chain
	1.2 Diversify Tourism Product	2.2 Ensure Safety and Security, Prioritize Protection and Management of Heritage Sites
	1.3 Attract Tourism Investments	2.3 Increase Responsiveness to Environmental Protection and Climate Change
	1.4 Raise Capacity and Capability of Human Capital	
	1.5 Implement and Expand ASEAN Tourism Standards for Facilities, Services and	

	Destinations	
	1.6 Implement and Expand Connectivity and Destination Infrastructure	
	1.7 Enhance Travel Facilitation	

Sumber: ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025

Melalui visi tersebut terbentuklah 2 arahan strategis dan 10 aksi strategis untuk mencapai visi dan tujuan dari ATSP 2016-2025.<sup>40</sup> Arahan pertama dari ATSP 2016-2025 yaitu meningkatkan daya saing ASEAN sebagai destinasi wisata utama, kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN merupakan kelebihan yang dimiliki oleh ASEAN dan dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata yang berkualitas dan dapat bersaing dengan destinasi wisata di kawasan lainnya. Namun dalam mengembangkan kelebihan ini terdapat kelemahan utama yaitu pada infrastruktur dan sumber daya manusia. Oleh karena kelemahan tersebut kemudian ASEAN ditantang untuk meningkatkan daya saing pada sektor pariwisata di negara-negara anggotanya melalui pemfokusan pada bidang pemasaran, pengembangan produk, investasi, infrastruktur dan konektivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada arahan ini terdapat 7 aksi strategis yang dapat mendorong kepada pencapaian tujuan peningkatan daya saing pariwisata yaitu pengintensifan

<sup>40</sup> Asean, "ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025" (Indonesia, 2016), <https://aec.utcc.ac.th/wp-content/uploads/2016/08/Asean-Tourism-Stratgic-Plan-2016-2025.pdf>.

promosi dan pemasaran produk wisata, menciptakan produk wisata yang beragam, menarik investasi pariwisata, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menerapkan standarisasi pada fasilitas pariwisata, memperluas konektivitas antar negara kawasan serta membangun infrastuktur, dan meningkatkan fasilitas perjalanan. Selanjutnya terdapat arahan kedua dalam ATSP 2016-2025 yaitu memastikan bahwa pariwisata ASEAN berkembang secara berkelanjutan dan inklusif. Arahan ini merupakan arahan jangka panjang yang dibagi menjadi 3 aksi strategis yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan pemerintah serta swasta dalam rantai nilai pariwisata, menjamin keselamatan, keamanan, dan perlindungan kepada wisatawan serta pengelolaan situs warisan, dan meningkatkan ketangguhan terhadap perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen terhadap pengimplementasian strategi ATSP dan komitmen ini dibuktikan oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif dengan membentuk Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2020-2024 yang mana terdapat 8 arahan dan 26 aksi strategi yang telah disusun sejalan dengan strategi ATSP 2016-2025, hal ini diperkuat dengan pernyataan Kemenparekraf saat *ATF Meeting 2023* bahwa hingga saat ini sebesar 60% dari strategi yang dijalani oleh kemenparekraf telah sesuai dengan strategi ATSP 2016-2025.<sup>41</sup> Melalui rencana strategis ini juga kemudian mendorong dinas pariwisata di setiap daerah untuk turut

---

<sup>41</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, "Siaran Pers: ATF 2023 Sepakati Perkuatan Langkah Strategis Implementasikan Strategi Pariwisata ASEAN," Kemenparekraf, 2023, <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-atf-2023-sepakati-perkuatan-langkah-strategis-implementasikan-strategi-pariwisata-asean>.

mengintegrasikan strategi ATSP ke dalam rencana strategis pariwisata daerahnya dan menjadi pedoman bagi pembentukan kebijakan Kepariwisataan di provinsi.

## **2.5 Strategi “Upgrade Local Communities and Public-Private Sector Participation in the Tourism Value Chain”**

Dalam mengembangkan pariwisata diperlukan keterlibatan dari berbagai pihak terkait dalam hal ini dapat berasal dari pemerintah, sektor swasta, hingga ke masyarakat dimana seluruhnya memiliki peranan masing-masing untuk mendorong laju pertumbuhan pariwisata. Keterlibatan peran masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata menjadi salah satu hal penting dan menjadi sebuah keharusan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan karena masyarakat lokal yang memahami kondisi dari lingkungannya.<sup>42</sup> Oleh karena itu dalam strategi ini pembentukan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, serta peningkatan investasi menjadi indikator, sehingga melalui implementasi strategi *Upgrade Local Communities and Public-Private Sector Participation in the Tourism Value Chain* diharapkan pengembangan sektor pariwisata dapat melibatkan masyarakat yang kemudian juga dapat bersinergi dengan pemerintah dan sektor swasta guna melaksanakan dan mendukung pembangunan pariwisata. Melalui strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat diharapkan masyarakat lokal dapat diberikan pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan

---

<sup>42</sup> Panji Try Yatmaja, “EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN,” *ADMINISTRATIO* 10, no. 1 (2019): 27–36, <https://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/93/60>.

masyarakat agar mampu mengidentifikasi permasalahan, potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang ada dalam lingkungannya untuk selanjutnya dapat membentuk pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat dan merencanakan berbagai program di daerahnya.<sup>43</sup>

Keterlibatan masyarakat dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) juga menjadi salah satu indikator dari keterlibatan masyarakat dalam pariwisata. Pokdarwis adalah sebuah organisasi atau kelompok yang menjadi sebuah upaya untuk mengkoordinasikan perlibatan masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan di daerah pariwisata tersebut.<sup>44</sup> Di Kalimantan Timur sendiri sejak tahun 2020 hingga tahun 2021 jumlah Pokdarwis menunjukkan peningkatan dari 138 kelompok pada tahun 2020 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 175 kelompok dengan 2408 anggota masyarakat yang tergabung dan pada tahun 2022 menunjukkan kesetabilan pada 175 kelompok namun terjadi peningkatan jumlah anggota dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan jumlah anggota mencapai 2480 orang.<sup>45</sup> Pokdarwis dapat terbentuk atas inisiatif dari masyarakat ataupun dari dorongan dinas pariwisata setempat, umumnya pada suatu pokdarwis terfidiri atas 15 anggota dimana berasal dari masyarakat sekitar yang sumber penghasilannya berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa untuk

---

<sup>43</sup> *Ibid. Hal 55*

<sup>44</sup> S. F. FITRIA, K. S., Akba, D., & Riyadi, "ADAPTASI ASEAN TOURISM STRATEGIC PLAN DALAM PENGEMBANGAN SUSTAINABLE TOURISM DI KABUPATEN BINTAN STUDI KASUS: KELONG WISATA BINTAN" (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2023), [http://repositori.umrah.ac.id/5743/3/KARINA\\_SALSA\\_FITRIA\\_190564201025\\_Ilmu\\_Hubungan\\_Internasional-BAB 1.pdf](http://repositori.umrah.ac.id/5743/3/KARINA_SALSA_FITRIA_190564201025_Ilmu_Hubungan_Internasional-BAB 1.pdf).

<sup>45</sup> Sekretariat Satu Data Indonesia, "Data Rkpd Pariwisata Prov Kaltim Tahun 2016 2023," BAPPENAS, 2021, <https://katalog.data.go.id/dataset/data-rkpd-pariwisata-prov-kaltim-tahun-2016-2023>.

keperluan wisatawan secara langsung maupun tidak langsung ataupun masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi wisata tersebut.

Dalam strategi ini selain dari keterlibatan masyarakat yang menjadi komponen penting lainnya adalah keterlibatan pemerintah dan sektor swasta. Kerjasama antara pemerintah, dan swasta sangat berpengaruh dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam hal ini pemerintah berperan untuk membentuk regulasi yang berkaitan dengan pariwisata dan investasi serta menjadi penyedia fasilitas pembangunan dan infrastruktur untuk mempermudah konektivitas dan akses menuju destinasi wisata dalam hal ini pemerintah juga harus melibatkan pihak swasta dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur, penyediaan tenaga ahli dan tenaga trampil dalam bidang pariwisata, sumbangan dana, alat, dan teknologi.<sup>46</sup> Oleh karena itu output dari pengimplementasian strategi *upgrade local community and public-private participation in the tourism value chain* ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi, keterlibatan pemerintah dalam membentuk aturan terkait pariwisata dan investasi dan meningkatkan peran dari sektor swasta untuk membangun infrastruktur dan fasilitas pariwisata agar nantinya dapat menciptakan pariwisata ASEAN yang berkelanjutan dan inklusif.

---

<sup>46</sup> Maria Bernadetha Ringa, "Peran Pemerintah, Sektor Swasta Dan Modal Sosial Terhadap Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur," *Bisman-Jurnal Bisnis & Manajemen* 3, no. 02 (2019): 30–38.

## 2.6 Harmonisasi strategi ATSP dengan Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Indonesia

Untuk melihat implementasi strategi ATSP 2016-2025 pada tingkat Provinsi Kalimantan Timur, terlebih dahulu dapat melihat adaptasi strategi ATSP pada kebijakan pariwisata nasional Indonesia oleh Kementerian Pariwisata. ATF sendiri secara general mengarah pada forum dan pertemuan untuk meningkatkan kualitas pariwisata negara ASEAN agar dapat bersaing dan menjadi *single destination*, serta didorong dengan adanya pameran bagi industri pariwisata. Inti dari ATF adalah mengembangkan destinasi pariwisata asean sebagai main player dalam pariwisata dunia dan menciptakan pariwisata asean yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.<sup>47</sup>

Kementerian pariwisata terlibat dalam ATF melalui beberapa layer program

1. *Ministrial meeting*, yang membahas terkait kerjasama dan pembahasan strategis. Pada program ini dari kementerian pariwisata menunjuk bagian hubungan antar lembaga untuk terlibat di dalamnya
2. *Expo tourism*, yang terkait dengan pameran kepariwisataan, dari kementerian pariwisata menunjuk bagian pemasaran untuk terlibat pada kegiatan ini

Adanya perubahan tren global dalam berwisata yang saat ini lebih cenderung pada wisata asia tenggara harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk

---

<sup>47</sup> Adesty dan Lasally and Lutfi Handayani, "The Role of the ASEAN Tourism Forum (ATF) in Supporting Indonesian Tourism," *Journal of Gastro Tourism* 1, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/https://shmpublisher.com/index.php/jogasto/article/view/147>.

menciptakan *single tourism destination*. Salah satu pemanfaatannya adalah dengan memperkuat pengimplementasian dari ATSP dimana ATSP sendiri diciptakan untuk menjadi *guideline* bagi negara-negara ASEAN untuk pengembangan sektor pariwisata untuk mewujudkan ASEAN sebagai *single tourism destination*.

Indonesia menjadi negara yang sangat serius terhadap kontribusinya pada *Asean Tourism Forum* melalui keikutsertaannya dalam setiap kegiatan ATF seperti turut terlibat berpartisipasi dalam acara tahunan ATF, pameran, conference, dan *ministerial meeting*. Selain itu ATSP menjadi acuan dalam pembentukan kebijakan oleh pemerintah hal ini dikarenakan agar Indonesia tidak tertinggal dan kalah bersaing dengan negara asean lainnya, untuk menunjukkan komitmennya dalam pengimplementasian strategi *Asean Tourism Strategic Plan* Indonesia berkomitmen kuat dengan memasukkan poin-poin dari *strategic direction* ATSP pada Rencana Strategis Kementerian Pariwisata.

*“...dalam membuat rencana strategis Indonesia pastinya menurunkan dari strategic direction yang ada (dalam ATSP), karena ini kan kesepakatan ya jadi kita mesti memegang atas kesepakatannya”*

Sumber: Wawancara dengan Ibu Agustini Rahayu, Direktur Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Dalam melihat proses dari harmonisasi antara poin-poin strategi ATSP pada kebijakan pariwisata di Indonesia dalam hal ini adalah Renstra yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata sebagai pemangku tanggung jawab kemudian menggunakan konsep intermestik dimana melalui konsep ini melihat kebijakan

yang berasal dari lingkup internasional kemudian dapat memiliki pengaruh terhadap perubahan kebijakan dari faktor-faktor domestik. Melalui proses harmonisasi ini akan memetakan terkait proses dari kesepakatan tersebut sejak awal disetujui di forum regional kemudian diharmonisasikan dan diturunkan pada kebijakan domestik Indonesia hingga kebijakan tersebut dapat diharmonisasikan ke level yang lebih kecil yaitu daerah.

Dalam proses pengimplementasian strategi ATSP oleh Indonesia terlebih dahulu terdapat proses koordinasi antara ATF dengan kementerian pariwisata Indonesia, proses koordinasi ini dilaksanakan utamanya saat *ministerial meeting* (M-ATM) yang dihadiri oleh menteri pariwisata setiap negara disetiap tahunnya, pada *ministerial meeting* tersebut kemudian menyepakati untuk berkomitmen pada strategi ATSP 2016-2025 yang masih berjalan hingga saat ini.<sup>48</sup>

Setelah dilaksanakan *ministerial meeting* kemudian sesegera mungkin akan dilaksanakan rapat internal kemenparekraf untuk menindaklanjuti komitmen yang telah disepakati saat *ministerial meeting* serta mengkoordinasikan ATSP dengan anggota kementerian pariwisata dan melakukan sinkronisasi dengan kondisi pariwisata Indonesia. Pada rapat internal ini akan melibatkan seluruh bagian dari kemenparekraf, sedangkan Deputi Kerjasama Antar Lembaga Kemenparekraf berperan sebagai penanggung jawab rapat yang akan memperkenalkan setiap poin dari ATSP pada seluruh bagian dan anggota dari kemenparekraf untuk selanjutnya akan dilakukan pengkajian oleh setiap bagian untuk dapat memetakan upaya apa

---

<sup>48</sup> Lisbet, "Pemanfaatan Forum Pariwisata Asean Untuk Promosi Pariwisata Indonesia," *Kajian* 25, no. 1 (2020): 35–52, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/download/1887/895>.

saja yang dapat dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk komitmen dan implementasi dari kesepakatan yang dijalankan oleh Indonesia. Dari rapat internal ini kemudian akan menghasilkan dokumen rancangan teknokratik yang berisi hasil dari rapat internal tersebut berupa pemaparan kondisi pariwisata Indonesia, potensi pariwisata, masalah yang sedang dihadapi oleh pariwisata Indonesia, isu-isu strategis, serta poin-poin komitmen yang sedang dijalankan oleh Indonesia.

Setelah terbentuk rancangan teknokratik kemudian diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk melakukan penyusunan dan penelaahan rancangan renstra yang akan melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pariwisata seperti pengusaha akomodasi (hotel, homestay, penginapan), transportasi, FnB, Asosiasi (seperti *Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies* (ASITA), Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), *Community based* (pengelola desa wisata, GenPi, Pokdarwis), kepala dinas pariwisata, dan seluruh bagian dari kementerian pariwisata dimana pada Rakornas ini kementerian pariwisata bersama dengan stakeholder pariwisata akan melakukan penyusunan dan penelaahan rancangan renstra 2020-2024 yang akan didasarkan pada RPJMN 2020-2024, arahan strategis ATSP, dan analisis kondisi pariwisata Indonesia.<sup>49</sup> Terlibatnya seluruh stakeholder pariwisata dalam perancangan renstra ini kemudian berperan penting untuk memberi berbagai masukan agar rencana startegis ini nantinya dapat relevan dengan kondisi pariwisata Indonesia. Rencana

---

<sup>49</sup> Azhari Setiawan, "Kemenparekraf Gelar Rakornas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2020," Kementerian Pariwisata, 2020, <https://wonderfulimages.kemenparekraf.go.id/read/350/kemenparekraf-gelar-rakornas-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-2020>.

strategis merupakan bukti dari komitmen Indonesia dalam pengimplementasian ATSP, dimana dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2020-2024 berfokus pada 3 tujuan yaitu sustainable tourism, inclusive tourism, serta peningkatan daya saing pariwisata Indonesia, dimana ketiga fokus tersebut telah disesuaikan dengan arahan ATSP 2016-2025 untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan hingga bertahun-tahun untuk terus menjaga pergerakan ekonomi di setiap destinasi serta memberikan kontribusi bagi sosial dan ekonomi.<sup>50</sup>

Tujuan akhir dari rencana strategis ini adalah meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi nasional, dan tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pengimplementasian renstra 2020-2024. Dimana dalam renstra ini terdapat 7 arah kebijakan yaitu pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif bernilai tambah dan berdaya saing; pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis (*strategic partnership*); pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi; pengelolaan SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing; mewujudkan kreativitas anak bangsa dengan berorientasi kepada pergerakan ekonomi kerakyatan; mendorong riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan pariwisata dan ekonomi kreatif

---

<sup>50</sup> Kemenparekraf, "Rencana Strategis Perubahan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Dan Badan Pariwisata & Ekonomi Kreatif," Kemenparekraf, 2020, <https://tasransel.kemenparekraf.go.id/rencana-strategis-perubahan-kementerian-pariwisata-and-ekonomi-kreatif-dan-badan-pariwisata-and-ekonomi-kreatif/show>.

yang berkualitas; mewujudkan birokrasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang professional.<sup>51</sup>

Setelah rancangan renstra disepakati oleh seluruh stakeholder maka akan dilakukan proses verifikasi dengan lembaga pemerintahan lainnya yang akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024.<sup>52</sup> Setelah itu kemudian rancangan renstra dapat resmi menjadi renstra dan dapat berlaku sebagai Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020-2024 terdapat pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Badan

---

<sup>51</sup> MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/, KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, and REPUBLIK INDONESIA, “RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/ BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TAHUN 2020-2024” (Jakarta, 2020), [https://api2.kemendparekraf.go.id/storage/app/resources/media\\_1598741123\\_Renstra\\_Kemendparekraf\\_2020-2024.pdf](https://api2.kemendparekraf.go.id/storage/app/resources/media_1598741123_Renstra_Kemendparekraf_2020-2024.pdf).

<sup>52</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, “Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024” (Jakarta, 2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/254680/permen-ppnkepala-bappenas-no-5-tahun-2019>.

Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 yang disahkan menjadi perundangan pada 29 Juli 2020.<sup>53</sup>

Untuk mempermudah dalam memahami alur pengimplementasian strategi ATSP pada tingkat nasional maka dapat dipaparkan melalui alur berikut:

### **Bagan 2.1 Bagan Alur Proses Pembentukan Rencana Strategis**

#### **Kementerian Pariwisata Indonesia**

##### **Ministerial Meeting (M-ATM)**

Ministerial meeting dihadiri oleh menteri pariwisata dari seluruh negara anggota ASEAN dan akan mendiskusikan dan menghasilkan komitmen antar negara salah satunya adalah ATSP. ATSP 2016-2025 disepakati melalui M-ATM ke 19 dan tertulis dalam Joint Media Statement yang diantaranya memaparkan terkait visi dari ATSP 2016-2025 dan menekankan untuk setiap negara agar dapat mengimplementasikan strategi ATSP untuk meningkatkan kualitas standar pariwisata ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai *world single destination*.

<sup>53</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024” (Jakarta, 2020), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/169207/permenpar-no-12-tahun-2020>.

### **Rapat Internal KEMENPAREKRAF**

Setelah adanya kesepakatan yang dibentuk dalam M-ATM, Indonesia sendiri menindak lanjuti komitmen yang telah disepakati melalui rapat internal KEMENPAREKRAF yang menjadi tanggung jawab Deputi Kerjasama Antar Lembaga. Dalam rapat ini poin-poin dari ATSP akan diperkenalkan kepada seluruh bagian dari KEMENPAREKRAF serta akan dikaji strategi apa yang akan dibentuk untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut. Dari rapat ini kemudian akan menghasilkan dokumen rancangan teknokratik yang dimana dalam dokumen tersebut berisi pemaparan kondisi pariwisata Indonesia, potensi pariwisata, masalah yang sedang dihadapi, isu-isu strategis, serta poin-poin komitmen Indonesia yang telah disesuaikan dengan kondisi pariwisata Indonesia serta komitmen pariwisata yang telah disepakati oleh Indonesia.



### **Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS)**

Setelah terbentuknya rancangan teknokratik oleh KEMENPAREKRAF kemudian akan diadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Pada Rakornas akan dibahas mengenai penyusunan dan penelaahan rancangan Renstra, dimana dalam proses ini akan melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pariwisata seperti diantaranya pengusaha di bidang akomodasi, transportasi, travel agent, Asosiasi pariwisata, Dinas Pariwisata, dan pengelola desa wisata. Untuk pembentukan Renstra 2020-2024 sendiri dilaksanakan pada saat rekornas tahun 2019 serta melakukan penyesuaian antara rancangan renstra dengan RPJMN 2020-2024, poin dari ATSP dan kondisi pariwisata Indonesia.

Dari pembentukan rencana strategis ini kemudian diharapkan dapat menjadi arahan bagi pembangunan kepariwisataan nasional untuk lebih terarah dan terukur serta memastikan partisipasi dari setiap stakeholders terlebih yang berkaitan dengan value chain pariwisata seperti transportasi, akomodasi, destinasi, penyedia makanan dan minuman, souvenir, dan kegiatan wisata dalam membangun kepariwisataan yang berkelanjutan.<sup>54</sup> Nantinya seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan sektor pariwisata bertanggung jawab atas pengimplementasian rencana strategis ini, sedangkan terkhusus untuk regulasi, fasilitasi ministerial meeting, dan pembentukan produk kebijakan dari rekomendasi strategis merupakan tanggung jawab dari kementerian pariwisata. Untuk memastikan tercapainya tujuan dari strategi ini kemudian kementerian pariwisata menekankan terciptanya sinkronisasi program antar program nasional dan daerah yang berjalan dengan baik, terciptanya lapangan pekerjaan dalam sektor pariwisata bagi masyarakat, serta meningkatkan keterlibatan sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional.<sup>55</sup>

Pariwisata yang inklusif juga menjadi salah satu poin yang ditekankan pada ATSP 2016-2025 yang dituangkan pada aksi strategis “*Upgrade Local Communities and Public-Private Sector Participation in the Tourism Value Chain*”. Dalam peningkatan partisipasi dari masyarakat lokal kemenparekraf

---

<sup>54</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “RENCANA STRATEGIS 2020-2024 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF” (Jakarta, 2020), <https://kemenparekraf.go.id/hasil-pencarian/rencana-strategis-2020-2024-kemenparekraf-baparekraf>.

<sup>55</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “Kemenparekraf Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Parekraf Di Pusat Dan Daerah,” Kemenparekraf, 2022, <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kemenparekraf-tekanan-pentingnya-sinkronisasi-program-parekraf-di-pusat-dan-daerah>.

memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat, pengelolaan destinasi yang berbasis masyarakat, dan memfasilitasi pengembangan bagi kualitas SDM. Sehingga pada Renstra Kementerian Pariwisata 2020-2024 poin-poin dari strategi “*Upgrade Local Communities and Public-Private Sector Participation in the Tourism Value Chain*” diturunkan pada strategi ke 5 yaitu pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif.<sup>56</sup>

*“... pastinya strategi ini melibatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pariwisata. Dalam perencanaan rencana strategis itu kami melibatkan banyak stakeholder ga cuma kita aja yang bikin tapi juga bagaimana kami melibatkan masyarakat lokalnya yang mempunyai destinasi.”*

Sumber: Wawancara dengan Ibu Agustini Rahayu, Direktur Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Kementerian pariwisata sendiri mengartikan Local Community pada masyarakat yang berhubungan dan terlibat secara langsung dengan destinasi pariwisata, keterlibatan ini dapat melalui bisnis swasta, bisnis lokal, maupun bisnis masyarakat. Kementerian Pariwisata sendiri melihat bahwa keterlibatan masyarakat sekitar destinasi merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai sustainable tourism, sehingga untuk mewujudkan wisata yang inklusif terdapat beberapa elemen yang harus menjadi perhatian yaitu perlibatan masyarakat dalam produsen pariwisata, memperluas akses pariwisata terhadap pariwisata yang jarang dikunjungi, meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>56</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “Rencana Strategis Perubahan Kementerian Pariwisata & Ekonomi Kreatif Dan Badan Pariwisata & Ekonomi Kreatif,” Kemenparekraf, 2022, <https://tasransel.kemenparekraf.go.id/rencana-strategis-perubahan-kementerian-pariwisata-and-ekonomi-kreatif-dan-badan-pariwisata-and-ekonomi-kreatif/show>.

Salah satu bentuk aksi dari kemenparekraf terhadap strategi tersebut adalah salah satunya melalui program *upskilling* yang dibentuk oleh kemenparekraf sebagai bentuk meningkatkan kualitas masyarakat yang merupakan implementasi dari renstra 2020-2024 pada strategi ke 5 yaitu pemberdayaan masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif.

*“Kita ada program kalau untuk masyarakatnya kita ada program upskilling, jadi kita mengupayakan upgrade community dengan caranya itu namanya kegiatan-kegiatan upskilling untuk meningkatkan capacity local community untuk mengelola destinasiya hingga memiliki daya saing. Kita kemenparekraf terus berkomitmen untuk melakukan kegiatan upskilling ini”*

Sumber: Wawancara dengan Ibu Agustini Rahayu, Direktur Kajian Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

Kementerian pariwisata berkomitmen untuk melakukan program *upskilling* untuk meningkatkan kapasitas komunitas masyarakat yang berada pada sekitar destinasi wisata, agar nantinya masyarakat dapat mengelola destinasiya sendiri untuk menciptakan daya saing dan nilai tambah bagi tiap destinasi wisata di Indonesia.<sup>57</sup> Setelah dibentuknya Renstra pada tahun 2020 untuk memastikan bahwa rencana strategis dibentuk dapat terimplementasikan dengan maksimal, disetiap tahunnya Kementerian Pariwisata konsisten menggelar rakornas untuk mengevaluasi, memperkuat komitmen, serta memastikan renstra yang telah dibentuk dijalankan dengan maksimal.

---

<sup>57</sup> KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, “Kemenparekraf Minta Pemerintah Daerah Lakukan Training Need Analysis,” Kemenparekraf, 2022, <https://www.kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-kemenparekraf-minta-pemerintah-daerah-lakukan-training-need-analysis>.

Dalam menciptakan sustainable tourism selain dari keterlibatan aktif dari masyarakat, pemerintah dan sektor swasta juga memegang peranan penting dalam pengembangan sustainable tourism di Indonesia. Peran dari pemerintah yang terbagi menjadi 2 yaitu pemerintah nasional dalam hal ini adalah kementerian pariwisata serta pemerintah daerah seperti dinas pariwisata di setiap daerah di Indonesia, Kementerian Pariwisata berada dalam *political power* ditingkat nasional yang bertanggung jawab untuk melakukan perancangan, pembentukan, pengimplementasikan dan evaluasi regulasi, mengkoordinasi, mempromosikan dan memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan sektor pariwisata di tingkat nasional.

Sedangkan peran dari dinas pariwisata adalah untuk mendukung pemerintah pusat untuk mengimplementasikan kebijakan pariwisata nasional melalui pembentukan kebijakan yang disesuaikan dengan kebijakan nasional serta kondisi pariwisata dan kebutuhan di masing-masing daerah agar kebijakan nasional yang telah dibentuk dapat relevan dengan keadaan pariwisata di masing-masing daerah.<sup>58</sup> Selain itu pemerintah daerah juga memiliki peran aktif dalam proses pembentukan kebijakan bersama dengan pemerintah nasional melalui Rakornas.

Sektor swasta juga memiliki peran yang penting dalam pengembangan pariwisata di Indonesia. Kemenparekraf selalu melibatkan sektor swasta pada setiap kegiatan pariwisata salah satunya adalah dengan melibatkan sektor swasta dalam ATF Expo, melalui keterlibatan ini kemudian Kemenparekraf juga

---

<sup>58</sup> S. Yudiyanti, Y., & Rahayu, "Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Dalam Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism).," *Jurnal Pariwisata*, 2013, 1–30, [https://eprints.uny.ac.id/21664/9/9\\_RINGKASAN.pdf](https://eprints.uny.ac.id/21664/9/9_RINGKASAN.pdf).

menyampaikan program yang ingin dicapai oleh kemenparekraf dalam Renstra dan RPJMN melalui hal ini kemudian menjadi upaya bagi Kemenparekraf untuk meningkatkan kepercayaan dari sektor pariwisata agar sektor swasta dapat berkenan untuk meletakkan investasinya pada sektor pariwisata di destinasi-destinasi di Indonesia terlebih bagi investasi yang mengarah pada peningkatan tourism value chain.<sup>59</sup> Dalam strategi ini kemudian juga memerlukan peranan dari pemerintah daerah untuk mendukung agar program yang telah dibentuk oleh Kementerian Pariwisata dapat terimplementasikan dengan maksimal hingga level pemerintahan terkecil.

Dalam hal keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta Kementerian Pariwisata utamanya lebih mengarahkan indikator capaiannya pada terciptanya sinkronisasi program yang berjalan dari ATSP hingga ke program yang berada di level daerah, membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat pengangguran baik di daerah maupun di tingkat nasional, meningkatkan daya saing Indonesia pada pariwisata di wilayah ASEAN, dan diharapkan dari dilaksanakannya program ini kemudian akan meningkatkan kontribusi dari sektor pariwisata pada perekonomian nasional.

---

<sup>59</sup> Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, “Menparekraf: ATF Dan Travex 2023 Terbukti Bangkitkan Ekonomi Dan Perluas Lapangan Kerja Di Yogyakarta,” Kemenparekraf, 2023, <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-atf-dan-travex-2023-terbukti-bangkitkan-ekonomi-dan-perluas-lapangan-kerja-di-yogyakarta>.